

# PEMBANGUNAN KAMPUNG BAHARI DALAM PERSPEKTIF *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* DI KAWASAN PESISIR TAMBAKLOROK KOTA SEMARANG

**Naila Authori, Kismartini Kismartini , R. Slamet Santoso**

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksilime (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

*The policy for the development of Kampung Bahari Tambaklorok is a special instruction from the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo in 2014 to the Semarang City Government. The Kampung Bahari program is described in detail in the Land and Building Planning Plan (RTBL) of Kampung Bahari Tambaklorok for 2016 which was prepared based on the Semarang City Regional Spatial Plan (RTRW) for 2011 – 2030 and the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) for the City of Semarang 2016 – 2021. Through a descriptive qualitative approach, this study aims to analyze the implementation and constraints of the Kampung Bahari Tambaklorok program in a sustainable development perspective. The results of the study indicate that the development policy of the Kampung Bahari Tambaklorok program aims to realize the principle of sustainable coastal area development based on an advanced, beautiful, and prosperous local economic environment. In its implementation, Kampung Bahari Tambaklorok sustainable development policy has not been fully fulfilled. Constraints faced in the implementation of development policies are the absence of a contribution to the Regional Original Income (PAD) of Semarang City, there is still resistance from community groups, social empowerment programs have not been implemented, changes to existing areas, the absence of legal and independent regulations regarding the village program, permits the lease-to-use asset has not been approved by PT. Pelindo, as well as institutional complexity. This study provides recommendations that Regional Original Revenue (PAD) can be obtained from development programs that have been completed, there is a need for synergy and synchronization between stakeholders from each development plan, the need for a review and evaluation of the implementation of development programs, the need for transparency in program implementation, and protection of the area through construction sheet pile needs to be implemented immediately, it will be an obstacle to other development programs.*

**Keywords:** *Development Policy, Sustainable Development, Kampung Bahari Tambaklorok Program*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pesisir merupakan wilayah yang sangat potensial dan juga wilayah yang sangat rentan. Wilayah pesisir mudah berubah dalam

skala temporal maupun spasial (Kismartini dan Bungin, 2019). Perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir diakibatkan oleh beberapa hal seperti adanya kegiatan industri, wisata, pelabuhan, pertanian, budidaya tambak, dan lain – lain. Selain itu, perubahan

wilayah pesisir juga disebabkan karena faktor alam atau letak geografis pesisir yang dekat dengan laut sehingga rentan terhadap abrasi dan rob.

Diperlukannya suatu upaya yang tepat serta kerjasama seluruh pihak baik dari *stakeholder* maupun masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir. Pembangunan kawasan pesisir terpadu tidak hanya berorientasi pada *economic growth* atau pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan secara ekologi.

Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 mulai merencanakan suatu kebijakan pembangunan strategis dan berkelanjutan bagi kawasan pesisir Kota Semarang, yaitu kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok. Kebijakan pembangunan ini merupakan instruksi khusus dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dalam rangka mewujudkan tujuan dari program Nawacita presiden tahun 2014 dimana dalam program tersebut dijelaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara maritim, akan tetapi pembangunan di bidang maritim kurang mendapatkan atensi sehingga kekayaan bahari Indonesia belum dieksplorasi secara optimal.

Kebijakan pembangunan program Kampung Bahari tertuang Praturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 yang kemudian dijelaskan secara terperinci dalam *masterplan* Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Tambaklorok 2016.

Kampung Bahari didefinisikan sebagai suatu penataan lingkungan tempat tinggal pesisir Tambaklorok, sehingga terwujudnya kawasan pesisir yang maju, asri, dan sejahtera dengan berbasis pada pengembangan lingkungan ekonomi lokal masyarakat. Terdapat empat fokus sebagai upaya untuk mewujudkan program Kampung Bahari Tambaklorok, yaitu: (1) peningkatan kualitas lingkungan; (2) pemanfaatan potensi reklamasi untuk kegiatan ekonomi; (3) program pemberdayaan masyarakat; (4) program pelatihan serta pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan program Kampung Bahari, masih terdapat beberapa kendala. Berdasarkan informasi yang termuat dalam *platform* berita *online* Tribun Jateng (2018) dijelaskan bahwa program Kampung

Bahari Tambaklorok khususnya pembangunan infrastruktur terdapat 40 rumah dan 1 pasar yang terdiri dari 50 lapak dan 21 kios yang terdampak. Dari beberapa warga yang terdampak pembangunan, terdapat 4 warga yang menolak dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang terkait besaran kompensasi yang diberikan. Selain itu, program Kampung Bahari Tambaklorok belum mendapatkan status izin pinjam pakai aset dari PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Karena, pada dasarnya lahan yang menjadi lokasi pembangunan Kampung Bahari merupakan milik PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Lokasi kawasan pesisir Tambaklorok sangatlah strategis, dekat dengan daerah industri, sehingga kawasan tersebut memiliki permasalahan yang begitu kompleks. Di kawasan pesisir Tambaklorok terdapat berbagai program pembangunan, yaitu pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok oleh Pemerintah Kota Semarang, program deliniasi permukiman kumuh oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat di bagian Tambak Mulyo, dan program pembangunan relokasi Banjir Kanal Timur oleh Dinas Pekerjaan Umum di bagian Tambak Rejo. Hal tersebut mengakibatkan tumpang tindih pelaksanaan pembangunan.

Pada tujuan pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok dijelaskan bahwa terdapat agenda pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, sampai saat ini belum adanya kegiatan yang mendukung pembangunan perekonomian masyarakat secara massif. Program pemberdayaan masih berupa konsep dasar dan belum adanya eksekusi secara dari pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok dalam rangka mewujudkan *sustainable development* wilayah pesisir Tambaklorok dengan mengangkat judul penelitian “Pembangunan Kampung Bahari dalam Perspektif *Sustainable Development* di Kawasan Pesisir Tambaklorok, Kota Semarang”.

## **B. Kerangka Teori**

### **Kebijakan pembangunan berkelanjutan kawasan pesisir**

Pada buku yang berjudul “Wilayah Pesisir Indonesia, Narasi Kebijakan Publik, Masalah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil di Indonesia” Kismartini dan Bungin (2019) menjelaskan bahwa pembangunan kawasan pesisir dikatakan berkelanjutan jika memenuhi

prinsip pembangunan berkelanjutan, yang dijelaskan sebagai berikut:

### **1) Dimensi Ekologi**

Pemanfaatan sumber daya pesisir baik di area darat maupun laut sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber dayanya. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu: (a) usaha konservasi; (b) memperhatikan daya dukung pesisir; (c) perlindungan keanekaragaman hayati.

### **2) Dimensi Ekonomi**

Pertumbuhan perekonomian haruslah dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir dalam dimensi ekonomi perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) peningkatan pendapatan masyarakat; (b) penyerapan tenaga kerja; (c) kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **3) Dimensi Sosial**

Pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir dalam dimensi ekonomi perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) keadilan sosial; (b) pemberdayaan masyarakat; (c) pemberdayaan kelembagaan; (d) pelibatan masyarakat (*stakeholder*); (e) memperhatikan nilai budaya local.

### **4) Dimensi Tata Kelola**

Segegap keterpaduan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan akan berhasil

diterapkan apabila ditunjang oleh keterpaduan dari pelaku dan pengelola pembangunan wilayah pesisir. Penyusunan perencanaan pengelolaan terpadu harus mampu mengakomodasi segegap kepentingan pelaku pembangunan pesisir. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir dalam dimensi ekonomi perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) partisipasi; (b) kepastian hukum; (c) transparansi; (d) efektifitas dan efisiensi; (e) akuntabilitas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitian di kawasan pesisir Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang serta berlokasi di kantor Pemerintahan Kota Semarang yang berperan dalam program Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok. Subjek penelitian yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Dinas Perikanan Kota Semarang, Kepala Kecamatan Semarang Utara, Kepala Kelurahan Tanjung Mas, serta Kepala Rukun Warga Kawasan Pesisir Tambaklorok. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan.

Kualitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.

## PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Pembangunan Program Kampung Bahari Tambaklorok dalam Perspektif *Sustainable Development*

**Tabel 1**

Keterkaitan program Kampung Bahari dengan empat dimensi pembangunan berkelanjutan

No	Tujuan SDG's Nasional	Tujuan SDG's Kawasan Pesisir	Pelaksanaan program Kampung Bahari
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja, yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua ( <b>Tujuan ke-8 SDG's Nasional</b> )	Peningkatan pendapatan masyarakat	Adanya infrastruktur penunjang perekonomian seperti pasar tradisional, akses jalan, serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berdampak bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pendapatan yang diketahui dari sektor perdagangan seperti ikan segar, olahan ikan, serta kerajinan dari hasil laut.
		Penyerapan tenaga kerja	Program Kampung Bahari telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Tambaklorok, seperti bagi para pedagang ikan, sayur, serta sembako, yang saat ini telah memiliki lokasi yang layak untuk berdagang. Pada saat pelaksanaan pembangunan, juga melibatkan masyarakat untuk bekerja sebagai tenaga kasar saat pembangunan jalan, pasar, ataupun RTH.
		Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Kampung Bahari Tambaklorok belum dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. PAD yang ditargetkan Kota Semarang pada program Kampung Bahari yaitu wisata bahari dan kegiatan industry.
2.	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dengan menjamin terpenuhinya hak bagi laki-laki maupun perempuan serta masyarakat miskin memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses pelayanan dasar. ( <b>Tujuan ke-1 SDG's Nasional</b> )	Pembangunan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat	Program pembangunan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Tambaklorok. Masyarakat Tambaklorok mempunyai keinginan bahwa mereka ingin terbebas dari bencana rob yang setiap hari mereka alami. Melalui program Kampung Bahari ini dilakukan pembangunan kawasan berupa perbaikan, perlindungan, serta pengembangan kawasan.
		Program pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pemberdayaan masyarakat Tambaklorok masih dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga atau organisasi pemberdayaan masyarakat, civitas akademik, maupun pihak swasta.
		Partisipasi masyarakat	Secara umum, masyarakat Tambaklorok sangat menyetujui adanya program Kampung Bahari, justru sangat menunggu realisasi pembangunan program. Akan tetapi memang ada beberapa oknum dengan beberapa kepentingannya terhadap program

			pembangunan dan mempengaruhi masyarakat lain, untuk menolak program pembangunan.
		Keterkaitan dengan kebudayaan lokal	Kawasan Tambaklorok mempunyai kebudayaan yang khas yaitu budaya sedekah laut. Pada perencanaan program Kampung Bahari sedekah laut akan dijadikan sebagai salah satu objek wisata Kampung Bahari, sehingga Pemerintah Kota Semarang sangat mendukung kebudayaan tersebut karena merupakan ciri khas Tambaklorok.
3.	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengurungan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati <b>(Tujuan ke-15 SDG's Nasional)</b>	Konservasi lingkungan	Berupa konservasi lahan mangrove yang bertujuan untuk mengantisipasi ancaman abrasi dan penurunan tanah di kawasan Tambaklorok. Zona konservasi mangrove ini terdapat di kawasan RW 16 Tambak Rejo.
	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan Samudra untuk pembangunan berkelanjutan <b>(Tujuan ke-14 SDG's Nasional)</b>	Pemanfaatan sumber daya perikanan	Pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian nelayan seperti TPI yang dapat menyeimbangkan harga perikanan di kawasan, pos parkir kapal dan pos penjagaan kapal nelayan agar kapal tidak rusak terkena ombak dan hanyut.
	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya <b>(Tujuan ke-13 SDG's Nasional)</b>	Daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kawasan pesisir Tambaklorok merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap abrasi dan rob. Sehingga diperlukan suatu upaya penanganan berupa pembangunan system <i>drainase</i> serta <i>sheetpile</i> yang mengelilingi kawasan, agar Tambaklorok dapat terbebas dari abrasi dan rob yang setiap hari terjadi.
	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan <b>(Tujuan ke-11 SDG's Nasional)</b>	Peningkatan infrastruktur kawasan	Program Kampung Bahari telah mampu mengatasi beberapa permasalahan lingkungan seperti rob dan sistem <i>drainase</i> . Beberapa daerah di Tambaklorok sudah terbebas dari rob misalnya di RW 15 karena sudah ada <i>sheetpile</i> dan tersedianya sistem drainase, jalan utama Tambak Mulyo juga sudah terbebas rob.
4.	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat <b>(Tujuan ke-16 SDG's Nasional)</b>	Partisipasi pemerintah, swasta, dan masyarakat	Minimnya koordinasi antar aktor, sehingga masing – masing belum memahami tugas pokok dan fungsinya pada program Kampung Bahari dengan baik.
		Kepastian hukum	Kebijakan pembangunan program Kampung Bahari termuat dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2016 – 2021, RTRW Kota Semarang tahun 2011 – 2031, dan secara terperinci dijelaskan dalam RTBL Kampung Bahari 2016.
		Transparansi	Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang akan dilakukan, akan tetapi berkaitan dengan keterbukaan informasi pasca pelaksanaan pembangunan tidak dilaksanakan.
		Efektivitas dan efisien	Program pembangunan yang telah dilaksanakan telah mampu mengatasi permasalahan kawasan

			<p>pesisir Tambaklorok, akan tetapi pembangunan belum memenuhi target yang telah direncanakan.</p>
		Akuntabilitas	<p>Akuntabilitas <i>stakeholder</i> atau aktor pada program pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok sudah cukup baik, karena telah adanya komitmen dari <i>stakeholders</i> yang terlibat untuk mengawal keberhasilan program, akan tetapi terkait dengan akuntabilitas pertanggungjawaban program belum dilaksanakan.</p>

Sumber: Diolah dari hasil observasi lapangan dan teori pembangunan berkelanjutan

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa adanya keterkaitan antara tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional dengan pembangunan berkelanjutan kawasan pesisir pada program Kampung Bahari Tambaklorok. Secara terperinci, pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok dalam perspektif *sustainable development* dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Dimensi Ekonomi

Pada tabel 1 dijelaskan bahwa, dimensi ekonomi pembangunan berkelanjutan terdapat pada tujuan ke-8 (delapan) SDG's nasional yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja, yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan SDG's nasional tersebut berkaitan dengan SDG's kawasan pesisir yang digunakan untuk menganalisis pembangunan Kampung Bahari di kawasan pesisir Tambaklorok yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kampung Bahari telah mampu memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat Tambaklorok. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya peningkatan infrastruktur penunjang perekonomian seperti pasar tradisional, akses jalan, serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dengan adanya pengadaan infrastruktur penunjang tersebut berdampak bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pendapatan serta penyerapan tenaga kerja. Masyarakat yang awalnya hanya bermata pencaharian sebagai nelayan, dengan adanya program Kampung Bahari mulai memiliki pekerjaan yang bermacam – macam seperti pedagang ikan, sayur, sembako, pengrajin UMKM ikan asap, kerang, terasi, limbah plastik, tukang parkir di area pasar tradisional yang mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat luar Tambaklorok, serta pekerja kasar seperti tukang bangunan dan tukang batu yang ikut berpartisipasi pada saat program pembangunan infrastruktur Kampung Bahari.

Peningkatan pendapatan masyarakat dapat diketahui dari sektor perdagangan

seperti ikan segar, olahan ikan, serta kerajinan dari hasil laut. Saat ini akses menuju kawasan Tambaklorok sudah mudah, jalan utama sudah tidak tergenang air rob, sehingga masyarakat luar Tambaklorok mulai berdatangan untuk mencari makanan khas laut. Dengan demikian hal tersebut cukup berdampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat Tambaklorok. Walaupun tidak diketahui pasti berapa persen peningkatan pendapatan masyarakat dengan adanya program Kampung Bahari ini. Sesuai dengan pendapat dari Masydzulhak (dalam Kismartini dan Bungin, 2019) mengenai dimensi ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi terkandung adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat atau GDP (*Gross Domestic Product*) dimana kenaikannya dibarengi oleh modernisasi serta memperhatikan aspek keadilan pendapatan.

Dengan adanya perbaikan infrastruktur kawasan kualitas kehidupan masyarakat Tambaklorok seperti daerah RW 13 hingga RW 15 sudah membaik. Kawasan permukiman yang dekat jalan utama Tambaklorok mulai tertata. Hal tersebut juga berdampak pada peningkatan harga aset tanah masyarakat. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang menjelaskan bahwa saat ini harga

aset tanah masyarakat Tambaklorok sudah cukup meningkat 5 kali lipat, yang awalnya hanya dihargai 100 – 150 ribu, saat ini sudah bernilai 500 – 1 juta. Dengan kenaikan harga aset tersebut, masyarakat dapat menggunakan aset tanah yang dimiliki untuk kebutuhan lainnya, seperti modal usaha.

Terkait dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), program Kampung Bahari Tambaklorok belum dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, hingga pendapatan sah lainnya seperti penerimaan jasa giro. PAD yang ditargetkan Kota Semarang pada program Kampung Bahari yaitu wisata bahari dan kegiatan industry. Akan tetapi saat ini program Kampung Bahari belum sampai tahap pembangunan wisata bahari dan industri maritim. Untuk saat ini PAD yang didapatkan dari pemerintah Kota Semarang di kawasan pesisir Tambaklorok adalah pajak dari aset tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan atribut dari dimensi ekonomi, program Kampung Bahari belum sepenuhnya memenuhi dimensi ekonomi pada program pembangunan berkelanjutan. karena masih terdapat beberapa target



pembangunan yang belum terpenuhi seperti pemerataan profitabilitas kontribusi sumber daya pesisir terhadap ekonomi daerah (PDRB) serta kontribusi sumber daya pesisir terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

## 2) Dimensi Sosial

Pada tabel 1 dijelaskan bahwa, dimensi sosial pembangunan berkelanjutan terdapat pada tujuan ke-1 (satu) SDG's nasional yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dengan menjamin terpenuhinya hak bagi laki-laki maupun perempuan serta masyarakat miskin memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses pelayanan dasar. Hal tersebut berarti dalam pelaksanaan pembangunan harus mampu menangani masalah kemiskinan serta perlu memperhatikan aspek keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara terperinci tujuan SDG's nasional tersebut dapat berkaitan dengan SDG's kawasan pesisir yang digunakan untuk menganalisis dimensi sosial pembangunan Kampung Bahari di kawasan pesisir Tambaklorok yaitu pembangunan yang berkeadilan sosial bagi masyarakat, program pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, keterkaitan dengan kebudayaan local.

Kawasan pesisir Tambaklorok merupakan kawasan dengan tingkat kemiskinan natural. Kemiskinan yang terjadi

disebabkan oleh faktor kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kepemilikan modal usaha dan teknologi yang masih minim, serta pola kehidupan masyarakat yang mengalokasikan penghasilannya untuk hal – hal konsumtif. kualitas sumber daya manusia yang rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih dibawah standar pendidikan masyarakat perkotaan. Program Kampung Bahari merupakan bentuk respon pemerintah terhadap permasalahan yang menjadi keluhan kesah masyarakat kawasan pesisir Tambaklorok.

Masyarakat Tambaklorok mempunyai keinginan bahwa mereka ingin terbebas dari bencana rob yang setiap hari mereka alami. Melalui program Kampung Bahari ini dilakukan pembangunan kawasan berupa perbaikan, perlindungan, serta pengembangan kawasan. Sehingga masyarakat Tambaklorok sangat merespon baik terhadap program pembangunan tersebut. Pro dan kontra selalu mewarnai setiap kebijakan pembangunan yang melibatkan kawasan milik masyarakat. Ketika proses sosialisasi dan pelaksanaan program pembangunan, terdapat beberapa penolakan dari masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat yang terdampak pembangunan menolak adanya pembangunan jalan utama Tambak Mulyo dikarenakan kompensasi yang didapatkan tidak sesuai

dengan keinginan masyarakat. Kompensasi yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Semarang telah sesuai dengan NJOP yang ditetapkan, bahkan telah dilebihkan, tetapi beberapa masyarakat tetap tidak bersedia menerimanya hingga menuntut Pemerintah Kota Semarang ke pengadilan negeri terkait ketidaksesuaian kompensasi yang diberikan. Akan tetapi, pada akhirnya masyarakat kalah dalam pengadilan tersebut. Sehingga, sampai saat ini pembangunan jalan utama Tambak Mulyo belum sepenuhnya selesai, karena masih terdapat beberapa lahan yang belum bersedia dibebaskan sehingga jalan utama Tambaklorok belum dapat dilalui dua arah dan masih terpotong – potong.

Selain penolakan terhadap pembangunan jalan, terdapat penolakan masyarakat mengenai pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Alasan penolakannya yaitu masyarakat tidak bersedia jika lingkungan mereka menjadi bau amis ketika adanya bangunan TPI, padahal bau amis ikan merupakan ciri khas kawasan pesisir. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa lahan yang akan digunakan sebagai pembangunan TPI merupakan lahan masyarakat yang akan digunakan sebagai sarana olahraga, akan tetapi tidak adanya pengajuan izin kepada pemerintah kota mengenai penggunaan lahan tersebut sebagai sarana olahraga. Pada akhirnya, pemerintah kota melakukan

sosialisasi, negosiasi, dan pendekatan kepada masyarakat hingga masyarakat menyetujui pembangunan TPI tersebut.

Secara umum, masyarakat Tambaklorok sangat menyetujui adanya program Kampung Bahari, justru sangat menunggu realisasi pembangunan program. Akan tetapi memang terdapat beberapa oknum dengan beberapa kepentingannya terhadap program pembangunan dan mempengaruhi masyarakat lain, untuk tidak menyetujui program pembangunan. Karena pada dasarnya masyarakat Tambaklorok masih memiliki ikatan kekeluargaan dan kekerabatannya masih sangat kuat, sehingga jika dalam satu kerabat atau lingkungan sosial tidak menyetujui program pembangunan, maka akan mempengaruhi pihak lain. Hal tersebut terjadi karena masyarakat belum memiliki pendirian yang kuat dan masih sangat mudah untuk di adu domba.

Berkaitan dengan salah satu misi program Kampung Bahari, yaitu program pemberdayaan masyarakat, saat ini belum terealisasikan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Tambaklorok saat ini masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga atau organisasi pemberdayaan masyarakat, civitas akademik, maupun pihak swasta. Dalam program Kampung Bahari memang terdapat agenda

pembangunan masyarakat melalui program pemberdayaan, akan tetapi program tersebut termasuk pada tahapan ketiga hingga keempat pembangunan, sehingga saat ini belum menjadi prioritas. Walaupun program pemberdayaan masih dilakukan secara mandiri, masyarakat Tambaklorok tetap merespon dengan positif, karena tujuan dari pemberdayaan sosial yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki demi mendukung keberhasilan program Kampung Bahari.

Pada program Kampung Bahari terdapat agenda pembangunan fasilitas pendukung pengembangan sumber daya manusia seperti sekolah formal setingkat dasar hingga menengah. Tetapi untuk saat ini program tersebut juga belum terealisasi, sehingga fasilitas pendidikan di kawasan Tambaklorok terbilang masih minim, yang berpengaruh terhadap tingkat perkembangan pendidikan masyarakat. Saat ini fasilitas pendidikan yang dimiliki hanya tersedia sekolah dasar swasta dan fasilitas pendidikan sekolah menengah cukup jauh untuk dijangkau.

Selanjutnya, berkaitan dengan aspek kebudayaan, kawasan Tambaklorok mempunyai kebudayaan yang khas yaitu budaya sedekah laut. Pada perencanaan program Kampung Bahari sedekah laut akan dijadikan sebagai salah satu objek wisata

Kampung Bahari, sehingga Pemerintah Kota Semarang sangat mendukung kebudayaan tersebut karena merupakan ciri khas Tambaklorok. Pemerintah Kota Semarang sangat mendukung berbagai kebudayaan khas kawasan pesisir Tambaklorok, asalkan hal tersebut tidak berbahaya dan melanggar hukum.

Surya T. Djajadiningrat (2005:123) dalam bukunya yang berjudul “*Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban bagi Anak Cucu, Seputar Pemikiran Surya Tjahja Djajadiningrat*” menyatakan bahwa dimensi sosial pada pembangunan berkelanjutan mempunyai empat sasaran yaitu: (1) stabilitas penduduk melalui kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat; (2) pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk mengurangi kemiskinan. Sehingga dibutuhkannya pembangunan yang merata dan tidak timpang, sehingga menghasilkan kelas – kelas sosial; (3) mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan masyarakat; serta (4) mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. program diarahkan untuk manfaat bersama.

Berdasarkan hasil penelitian di kawasan pesisir Tambaklorok dan keterkaitan dengan teori *sustainable development* khususnya dimensi sosial, program Kampung Bahari belum sepenuhnya memenuhi konsep

pembangunan berkelanjutan. Secara garis besar, memang program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan tetapi kegiatan pembangunan belum dapat menyeluruh dan belum semua masyarakat merasakan dampak dari adanya pembangunan. Kegiatan pembangunan juga belum bisa membangun manusia sebagai subjek pembangunan, hingga saat ini kawasan Tambaklorok masih tergolong kawasan dengan tingkat perekonomian yang masih rendah, tingkat pendidikan juga belum merata, masyarakat belum dapat mengalokasikan pendapatannya secara bijak karena sampai saat ini alokasi pendapatan masih berfokus pada pembangunan rumah. Sehingga dimensi sosial belum terpenuhi secara optimal.

### **3) Dimensi Lingkungan**

Pada tabel 1 dijelaskan bahwa dimensi lingkungan pembangunan berkelanjutan terdapat pada tujuan ke-11, 13, 14, dan 15 SDG's nasional yang saling berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan kawasan pesisir yaitu, konservasi lingkungan, pemanfaatan sumber daya perikanan, daya dukung dan daya tampung kawasan, serta peningkatan infrastruktur kawasan.

Pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kampung Bahari, dijelaskan bahwa pembangunan program dibagi kedalam beberapa 6 zona

pembangunan, yaitu zona permukiman, zona pemukiman vertical, zona perdagangan dan jasa, zona wisata bahari dan kuliner, zona Pelabuhan perikanan dan ekonomi maritim, serta zona konservasi. Dari pembagian zonasi tersebut diketahui bahwa program Kampung Bahari telah mempertimbangkan kapasitas atau kemampuan kawasan menerima pembangunan. Pada bagian zona konservasi dijelaskan bahwa, zona tersebut akan dikembangkan menjadi konservasi mangrove yang bertujuan untuk mengantisipasi ancaman abrasi dan penurunan tanah di kawasan Tambaklorok. Zona konservasi mangrove ini terdapat di kawasan RW 16 Tambak Rejo. Saat ini konservasi mangrove dikelola oleh kelompok mangrove CAMAR (Cinta Alam Mangrove Asri dan Rimbun), sehingga nantinya program Kampung Bahari akan bekerjasama dengan kelompok mangrove CAMAR untuk pengembangan kawasan mangrove ini.

Selain konservasi kawasan mangrove, program Kampung Bahari juga mempertimbangkan pembangunan berbasis lingkungan, seperti adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) disepanjang jalan utama Tambak Mulyo. Hal tersebut bertujuan agar jalan utama tidak gersang, fasilitas drainase untuk penyerapan rob, serta mengurangi polusi di jalan utama.

Program Kampung Bahari juga mendukung pengelolaan potensi sumber daya perikanan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian nelayan seperti TPI yang dapat menyeimbangkan harga perikanan di kawasan, pos parkir kapal dan pos penjagaan kapal nelayan agar kapal tidak rusak terkena ombak dan hanyut.

Dari segi perbaikan lingkungan program Kampung Bahari telah mampu mengatasi beberapa permasalahan lingkungan seperti rob dan sistem *drainase*. Beberapa daerah di Tambaklorok sudah terbebas dari rob misalnya di RW 15 karena sudah ada *sheetpile* dan tersedianya sistem drainase, jalan utama Tambak Mulyo juga sudah terbebas rob. Secara keseluruhan perencanaan program Kampung Bahari telah mempertimbangkan pembangunan yang berbasis lingkungan, akan tetapi untuk saat ini efektivitas pelaksanaannya belum terlihat karena memang pembangunan belum terlaksana semua.

#### **4) Dimensi Tata Kelola**

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang efektif, efisien, akuntabel, serta transparan.

Pada tabel 1 dijelaskan bahwa dimensi tata kelola pembangunan berkelanjutan

terdapat pada tujuan ke-16 SDG's nasional, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat. Tujuan ke-16 SDG's ini berkaitan dengan dimensi tata kelola *sustainable development* kawasan pesisir yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, efektivitas dan efisien, serta akuntabilitas.

Tujuan dari *sustainable development* adalah mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan akses yang berkeadilan bagi semua dan membangun institusi – institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. Penyediaan akses yang berkeadilan tidak dapat terlepas dari peran *stakeholder* sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan publik. Keterpaduan *stakeholder* dalam aspek kelembagaan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan. Danhuri (2001) menyatakan bahwa diperlukan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan yang mencakup empat aspek, yaitu keterpaduan ekologis, keterpaduan sectoral, keterpaduan disiplin ilmu, dan keterpaduan *stakeholder*. Keterpaduan *stakeholder* diartikan bahwa kebijakan pembangunan akan berhasil diterapkan apabila ditunjang

oleh keterpaduan dari pelaku dan pengelola pembangunan wilayah pesisir, karena pembangunan kawasan pesisir harus mampu mengakomodasi segenap kepentingan pelaku pembangunan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan *stakeholder* yang terlibat pada program Kampung Bahari ini yaitu:

- a. Masyarakat Tambaklorok dengan kepentingan berupa peningkatan kehidupan ekonomi/taraf hidup serta peningkatan kehidupan sosial yang lebih baik.
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga Pemerintah Kota dengan dinas – dinas terkait, dengan kepentingan berupaya perkembangan kawasan baru, serta berkurangnya beban pembangunan yang ada di kawasan.
- c. Swasta seperti PT. Pelabuhan Indonesia, dengan kepentingan ekonomi berupa investasi yang cukup besar.

Berbagai aktor atau *stakeholder* yang terlibat dalam program Kampung Bahari masing – masing memiliki kepentingan yang berbeda – beda. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, masih terdapat minimnya koordinasi antar aktor, sehingga masing – masing belum memahami tugas pokok dan fungsinya pada program Kampung Bahari dengan baik.

Terkait indikator keterbukaan atau transparansi pemerintah kepada masyarakat, pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang akan dilakukan, akan tetapi memang tidak mudah karena masyarakat memiliki berbagai karakter yang unik dan berbeda – beda. Sehingga cukup sulit untuk menyatukannya dalam satu misi. Sosialisasi mengenai rencana program telah dilakukan dengan baik, akan tetapi belum ada evaluasi mengenai program pembangunan yang sudah terlaksana. Target pembangunan yang telah direncanakan juga belum sepenuhnya dapat tercapai, karena seharusnya saat ini pembangunan tahap 1 telah selesai, akan tetapi pelaksanaannya belum terselesaikan. Sehingga dimensi kelembagaan atau tata kelola pemerintah yang baik pada program Kampung Bahari belum sepenuhnya terpenuhi.

## **B. Kendala Pelaksanaan Program Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok**

### **1) Kendala Dimensi Ekonomi**

#### ***Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

Pada metadata dimensi ekonomi *sustainable development goals* BAPPENAS menjelaskan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk menguatkan sarana pelaksanaan

dan merevitalisasi kemitraan dengan indicator yang harus dipenuhi yaitu adanya kontribusi pembangunan terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari keuangan daerah dari wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung Bahari belum dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Semarang dikarenakan saat ini program Kampung Bahari masih dalam tahapan pembangunan lima tahunan kedua yaitu penataan kawasan, sedangkan untuk sasaran PAD Kota Semarang terhadap program Kampung Bahari adalah berkaitan dengan wisata bahari dan industri maritim. Justru untuk saat ini PAD Kota Semarang dialokasikan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan sebagaimana kawasan pesisir Tambaklorok dalam program Kampung Bahari.

## **2) Kendala Dimensi Sosial**

### ***Pemberdayaan masyarakat***

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu focus utama dalam program Kampung Bahari. Sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program Kampung Bahari

Tambaklorok harus segera dilaksanakan. Najam (1995) pada indicator *the content of policy* menjelaskan bahwa tujuan kebijakan yang telah ditetapkan haruslah dilaksanakan. Pada tahap pelaksanaannya tentu memiliki isu permasalahan, akan tetapi sebagai pelaksana kebijakan harus menganalisa bagaimana mengatasi permasalahan tersebut dan tujuan dapat tercapai. Sebagaimana pendapat Najam (1995), realitas dilapangan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program Kampung Bahari menjadi kendala pembangunan karena dinas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemberdayaan belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hingga saat ini program Kampung Bahari masih befokus pada peningkatan infrastruktur kawasan, sehingga belum adanya koordinasi dan perencanaan lebih lanjut mengenai konsep pemberdayaan masyarakat di kawasan Tambaklorok dengan Dinas Terkait.

Seyogyanya Konsep pembangunan berkelanjutan memperhatikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Untuk mewujudkan suatu konsep pembangunan berkelanjutan, selain dilaksanakannya pembangunan infrastruktur secara fisik, juga dibutuhkan pembangunan sumber daya manusia melalui program pemberdayaan. Sehingga dengan adanya peningkatan

kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas kehidupannya.

### ***Partisipasi masyarakat***

Dukungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok. Grindle dan Thomas dalam buku yang berjudul *Public Choice and Public Change (1991)* menjelaskan mengenai strategi pelaksanaan kebijakan dengan model interaktif. Asumsinya dengan model interaktif ini dapat tercapai sebuah keseimbangan pada berbagai tahap kebijakan yang telah diputuskan. Hal ini timbul karena kebijakan yang ada telah diterima oleh orang – orang yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Sehingga untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat dibutuhkan proses komunikasi secara interaktif dengan masyarakat sebagai subjek kebijakan.

Pada tahap sosialisasi program Kampung Bahari, memang terdapat beberapa masyarakat yang menolak, terutama masyarakat yang terdampak pembangunan, dan harus di relokasi, mereka tidak setuju dengan hasil kompensasi yang diberikan. Sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pamong wilayah dan juga pemerintah kota. Diperlukannya sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat mengenai

program Kampung Bahari, untuk memberikan penjelasan mengenai program Kampung Bahari hingga masyarakat siap untuk menerima dan berpartisipasi.

### **3) Kendala Dimensi Lingkungan**

#### ***Perubahan eksisting kawasan***

Kawasan Tambaklorok merupakan kawasan pesisir dengan tingkat penurunan tanah yang cukup tinggi, yaitu 10 – 20 cm per tahun sehingga menyebabkan kawasan rawan bencana abrasi dan rob. Rencana program Kampung Bahari dapat terselesaikan di tahun 2035, akan tetapi beberapa pembangunan yang sudah dilaksanakan ada yang sudah rusak. Seperti *sheet pile* perbatasan RW 15 dan RW 16, saat ini sudah tergenang oleh air laut, padahal dulu tinggi dan air laut belum bisa menjangkaunya. Sehingga program pembangunan di kawasan pesisir ini sangatlah kompleks.

Eksisting kawasan Tambaklorok di RTBL dengan realitasnya di tahun 2022 ini sangat berbeda. Pada saat perencanaan RTBL tidak ada program pembangunan huntera atau hunian sementara. Tetapi sekarang terdapat bangunan huntera di area kawasan program Kampung Bahari. Program huntera ini merupakan tempat relokasi bagi masyarakat Tambak Rejo yang tergusur. Sebelumnya, pada RTBL Kampung Bahari kawasan huntera ini merupakan area yang akan



digunakan untuk pembangunan konservasi mangrove. Dengan demikian, Pemerintah Kota Semarang beserta dinas terkait perlu melakukan review kembali mengenai perubahan eksisting kawasan sebelum melanjutkan program pembangunan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah saat ini.

#### **4) Kendala Dimensi Tata Kelola**

##### ***Legalitas program Kampung Bahari Tambaklorok***

Kejelasan isi kebijakan akan mempermudah dibuatkannya prosedur operasional (*institutional context – the corridor*), yang dapat memperjelas siapa melakukan apa, kapan, dan dimana dilakukannya, jika konten dan konteks kebijakan sudah jelas, yang dibutuhkan adalah komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan isi kebijakan.

Program Kampung Bahari Tambaklorok belum memiliki regulasi yang legal dan mandiri seperti perda ataupun perwal. Hal ini menjadi penyebab terkendalanya eksekusi pelaksanaan program, seperti dalam hal koordinasi dengan dinas atau OPD lain, pertanggung jawaban pelaksanaan program serta batasan – batasan dalam pelaksanaan program.

Sebagaimana penjelasan dari Najam (1995) bahwa lima variabel dalam kebijakan pembangunan yaitu konten kebijakan, konteks kebijakan, komitmen, kapaitas, serta

klien dan koalisi sebagai pelaksanaan kebijakan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian jika belum adanya regulasi legal dan mandiri mengenai program Kampung Bahari akan berpengaruh terhadap variabel lain. Misalnya menjadi tidak jelas siapa pelaksana kebijakannya, harus bertanggung jawab kepada siapa. Najam (1995) juga menjelaskan bahwa hal tersebut dapat berpengaruh terhadap melemahnya dukungan klien, koalisi, maupun masyarakat luas karena factor ketidakpercayaan.

##### ***Izin penggunaan kawasan***

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang menjelaskan bahwa Kawasan Tambaklorok termasuk ke dalam wilayah BWK III dan merupakan bagian dari transportasi laut Pelabuhan Tanjung Emas. Berkaitan dengan penggunaan lahan untuk pembangunan Kawasan Tambaklorok diperlukan koordinasi dengan *stakeholder* Pelabuhan Tanjung Emas, yaitu PT. Pelabuhan Indonesia.

Pemerintah Kota Semarang mengajukan izin pinjam pakai aset PT Pelindo untuk jangka waktu 20 tahun sesuai dengan perencanaan program Kampung Bahari. Izin tersebut hanya dapat diberikan oleh pemilik saham tertinggi, yaitu Kementerian BUMN. Hingga awal tahun 2022 proses perizinan penggunaan aset telah

disetujui oleh PT Pelindo dan izin tersebut sedang disposisi kepada Kementerian BUMN.

Proses yang terjadi pada izin pinjam pakai penggunaan kawasan ini sesuai dengan penjelasan dari Grindle (1980) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan – keputusan ke dalam prosedur – prosedur rutin serta saluran – saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Dengan demikian saat ini Pemerintah Kota Semarang masih dalam proses menunggu perizinan pinjam pakai aset milik PT Pelindo dari Kementerian BUMN yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan, sehingga program pembangunan belum dapat dilanjutkan karena belum mendapatkan perizinan penggunaan aset kawasan.

### ***Kompleksitas kelembagaan***

Pelaksanaan kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok memerlukan keterlibatan banyak *stakeholder* dari pemerintah pusat, swasta hingga masyarakat, sehingga diperlukannya komunikasi dan koordinasi secara struktural. Sedangkan untuk birokrasi saat ini masih terkesan berbelit – belit dan tidak sederhana. Program pembangunan Kampung Bahari juga berada di lokasi Pelabuhan Tanjung Mas

sehingga diperlukannya izin penggunaan kawasan oleh Pelabuhan, agar Pemerintah Kota dalam melanjutkan program pembangunan.

Kendala kompleksitas kelembagaan yang terjadi pada pelaksanaan program Kampung Bahari ini sesuai dengan beberapa teori mengenai pelaksanaan kebijakan publik, seperti kebijakan program pembangunan. Cheema dan Rondinelli (1983) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan perilaku badan – badan administrasi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap program, melainkan juga menyangkut jaringan – jaringan sistem politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya mempengaruhi dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Howlett dan Ramesh (1995) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program kebijakan tidak dapat terlepas dari seluruh rangkaian proses kebijakan yang berkaitan dengan “*nature of the problem*” seperti kesulitan teknis dalam pelaksanaan kebijakan, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, persentase kelompok sasaran, serta perubahan perilaku kelompok sasaran. Sehingga perilaku dari setiap pelaksana kebijakan serta sistem yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

program kebijakan, sebagaimana program Kampung Bahari Tambaklorok.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan program Kampung Bahari memang bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan, sebagaimana visi dari kebijakan pembangunna program Kampung Bahari yaitu “Terwujudnya kawasan Tambaklorok sebagai Kampung Bahari yang berbasis pada lingkungan ekonomi lokal yang maju, asri dan sejahtera”. Akan tetapi dalam hal pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Karena sistem pembangunan kawasan tidak dapat dilakukan instan, tetapi membutuhkan proses yang terencana serta terstruktur. Kawasan pesisir juga memiliki kompleksitas yang tinggi, sehingga untuk saat ini program Kampung Bahari belum memenuhi aspek pembangunan berkelanjutan.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masih terdapat kendala yang ditemui dalam kebijakan pembangunan program Kampung Bahari Tambaklorok dalam perspektif *sustainable development*, sehingga beberapa

saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

#### **1) Dimensi Ekonomi**

Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dapat diperoleh dari kebijakan pembangunan program Kampung Bahari yang sudah selesai dilaksanakan seperti pajak atau retribusi bangunan penduduk, retribusi pasar tradisional serta retribusi TPI Tambaklorok

#### **2) Dimensi Sosial**

Diperlukannya transparansi pelaksanaan program kepada *stakeholder* yang terlibat melalui laporan triwulan atau per semester agar *stakeholder* yang terlibat mengetahui dengan jelas progress program Kampung Bahari.

#### **3) Dimensi Tata Kelola**

Perlu adanya sinergi dan sinkronisasi antar *stakeholder* dari setiap rencana pembangunan yang ada di Kawasan Tambaklorok agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam pelaksanaan program.

#### **4) Dimensi Lingkungan**

- a. Dibutuhkan pelaksanaan review serta evaluasi program pembangunan, karena program Kampung Bahari merupakan program pembangunan jangka Panjang selama 20 tahun serta program pembangunan yang berlokasi di kawasan dengan tingkat perubahan eksisting kawasan yang tinggi. Sehingga diperlukannya

review melaksanakan program setiap satu semester atau setiap 5 tahun sekali dengan berbagai kajian – kajian terbaru sesuai perkembangan yang terjadi pada kawasan, terutama perkembangan kondisi lingkungan alamiah. Kajian – kajian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan antara lain seperti kajian pasang surut serta gelombang laut, AMDAL, *Feasibility Study* (FS), serta kajian lainnya yang relevan.

- b. Proteksi kawasan melalui pembangunan *sheet pile* perlu segera dilakukan sebelum melanjutkan pada program pembangunan yang lain. Karena bencana rob setiap hari masih melanda kawasan Tambaklorok, sehingga jika proteksi kawasan belum dilakukan akan menjadi kendala terhadap program pembangunan yang lain

## DAFTAR PUSTAKA

Anita, J. (2020). Perencanaan Kampung Bahari sebagai Upaya Keberlanjutan, Perkampungan Nelayan Tambaklorok, Semarang. *Jurnal Arsitektur TERRACOTA*, 171 – 179.

BAPPEDA Kota Semarang (2016). *Rencana Tata Bangunan dan Lahan (RTBL) Tambaklorok*. Kota Semarang.

Ferrol – Schulte, D., Wolff, M., Ferse, S., & Glaser, M. (2013). Sustainable Livelihoods Approach in tropical coastal and marine social – ecological systems: A review. *Marine Policy*, 42, 253–258.

Kismartini, & Bungin, B. (2019). *Wilayah Pesisir Indonesia, Narasi Kebijakan Publik, Masalah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Kismartini. (2019). *Buku Ajar Analisis Kebijakan Publik (Kerangka Dasar)*. Semarang: Undip Press.

Nugroho, P. C. (2019). Kajian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Implementasi Kampung Bahari Tambaklorok. *Makalah seminar nasional*, 1 – 13.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2030

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 –2021.

Setianingsih, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 27*, 61-74.

Suparmoko, Muhammad. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 39 – 50.

Trinada, T. C. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan. *Matra Pembaruan*, 75 – 84.